

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Fakir Miskin

Soma Gantika

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pasundan, Indonesia
Email: soma.gantika@unpas.ac.id

Diterima: 9 September, 2025, Direvisi: 8 Oktober, 2025, Disetujui: 25 December,
2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in Garut Regency. The research method used a qualitative approach with interview techniques, observation, literature study, and supplemented with document review. The program assessment was carried out using five indicators of organizational effectiveness according to Sutrisno in Astari (2018:17), namely program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real change. The results of the study show that, overall, the effectiveness of PKH in Garut Regency can be categorized as quite effective, especially in improving the quality of education and health of poor families. However, the effectiveness of the program is still limited in achieving long-term goals of economic independence and structural poverty alleviation.

Keywords: Effectiveness, Program Keluarga Harapan (PKH), Poverty Alleviation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan fakir miskin di Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, studi literatur serta dilengkapi dengan telaah dokumen. Penilaian program dilakukan dengan menggunakan lima indikator efektivitas organisasi menurut Sutrisno dalam Astari (2018:17), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, efektivitas PKH di Kabupaten Garut dapat dikategorikan cukup efektif, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Akan tetapi, efektivitas program masih terbatas dalam mencapai tujuan jangka panjang berupa kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan struktural.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Penanggulangan Fakir Miskin.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat struktural dan kronis. Di Indonesia, masalah ini tidak hanya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, tetapi juga menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebagai suatu wilayah, Kabupaten Garut tidak dapat terlepas dari

pemasalahan sosial berupa kemiskinan dan ketimpangan sosial. Banyak potensi kemiskinan yang dapat ditimbulkan dari berbagai faktor, diantaranya adalah mata pencaharian, nilai ekonomi, dan lain sebagainya. Permasalahan kemiskinan tidak bisa dianggap permasalahan sederhana, melainkan perlu adanya penanganan dan strategi khusus yang dilakukan pemerintah agar penyalurannya dapat dilakukan secara optimal serta tepat sasaran.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi rentan. PKH dicanangkan melalui Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018, yang menetapkan mekanisme, indikator penerima, dan jenis bantuan berdasarkan kategori anggota keluarga (anak usia sekolah, ibu hamil, lansia, disabilitas).

PKH bukan hanya program bantuan tunai, tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial, yaitu bagaimana penerima manfaat dibina agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan PKH disalurkan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui rekening bank atau sistem pembayaran lainnya. Proses penyaluran ini diharapkan dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga dilengkapi dengan program pendampingan. Setiap keluarga penerima manfaat biasanya memiliki pendamping sosial yang bertugas untuk memberikan informasi, edukasi, dan dukungan dalam mengelola bantuan yang diterima.

Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan pada

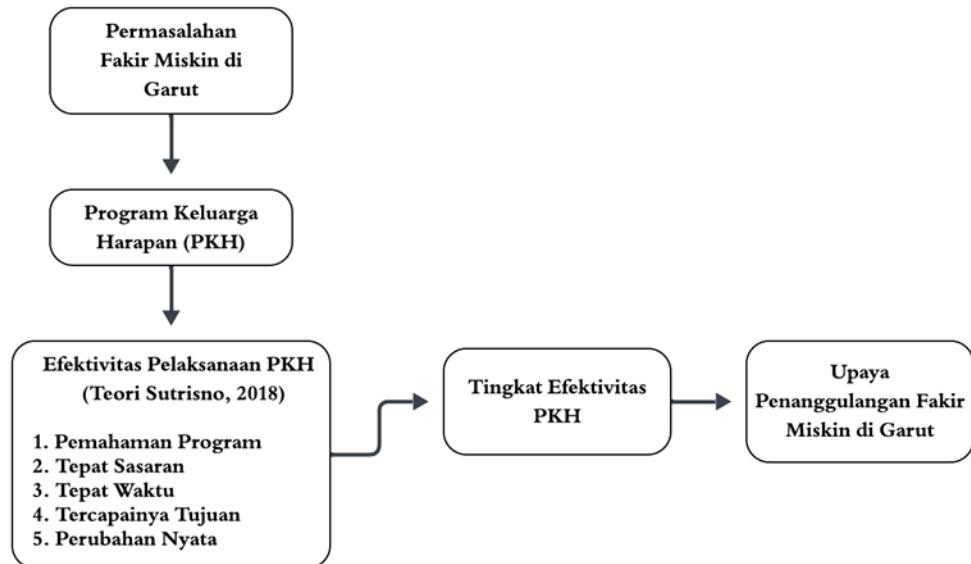
bagaimana program dijalankan dan dampaknya kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas program bantuan PKH akan dinilai berdasarkan teori Sutrisno dalam Astari (2018: 17) yaitu, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

METODE PENELITIAN

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Garut yang beralamat di jalan Patriot Nomor 33, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Penelitian ini dilaksanakan pada 10 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Menurut Stibi, I. (2017), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang bersifat interpretative serta tidak menggunakan hasil statistika sebagai dasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan beberapa metode agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi pustaka.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (2014) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, bertujuan agar data yang kompleks dapat dipahami secara lebih sederhana.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dengan teori serta hasil penelitian sebelumnya.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKH di Kabupaten Garut terbukti membantu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data Dinsos menunjukkan meningkatnya jumlah anak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang bersekolah hingga jenjang SMP dan SMA. Selain itu, program ini juga mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kabupaten Garut berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program-program yang terencana dan terukur. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang

memadai, serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat, Dinas Sosial berupaya untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat Garut. Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut telah menunjukkan efektivitas dalam membantu masyarakat miskin, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi pelaksanaan program secara optimal. Hambatan ini muncul dari faktor internal maupun eksternal, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun kultural.

Analisis implementasi kebijakan ini mengacu pada lima indikator utama sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno dalam Astari (2018: 17) yaitu;

1. Pemahaman Program

Pemahaman program dalam PKH di Kabupaten Garut dapat dikategorikan cukup baik tetapi belum merata. Di tingkat struktural, pemahaman aparat pemerintah dan koordinator sudah jelas dan konsisten. Mereka mengetahui maksud, tujuan, serta mekanisme teknis pelaksanaan. Namun di tingkat penerima, pemahaman masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, literasi, dan kebiasaan lama masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi program harus dilakukan dengan pendekatan kultural, menggunakan bahasa lokal, serta melibatkan tokoh masyarakat agar pesan terkait PKH lebih mudah diterima.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran tidak hanya terkait dengan akurasi data administratif, tetapi juga tentang keadilan bagi masyarakat. Program bisa dikatakan tepat sasaran apabila penerima sesuai dengan kriteria, sekaligus dirasakan adil oleh semua masyarakat. Indikator tepat sasaran dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Garut masih menghadapi kendala yang cukup serius, meskipun sudah dilakukan mekanisme perbaikan melalui verifikasi dan validasi. Tingkat efektivitas pada indikator ini dapat dikatakan cukup baik karena sudah dilakukannya upaya pembenahan, namun belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

3. Tepat Waktu

Indikator tepat waktu dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Garut relatif berjalan baik, tetapi belum sempurna. Sebagian besar pencairan memang dilakukan sesuai jadwal, namun masih terdapat kasus keterlambatan karena faktor teknis dan administratif. Ketepatan waktu juga berpengaruh pada persepsi keadilan dalam masyarakat. KPM yang menerima bantuan tepat waktu akan merasa dihargai dan didukung oleh negara, sedangkan mereka yang mengalami penundaan cenderung merasa kecewa.

4. Tercapainya Tujuan

PKH di Garut telah memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan, tetapi peningkatan kualitas SDM masih harus diperkuat. Tujuan PKH dalam meningkatkan kualitas manusia juga sudah terlihat, meskipun belum merata ke semua keluarga penerima manfaat sebab dipengaruhi oleh pola pikir penerima. Efektivitas PKH pada indikator ini dapat dikatakan cukup efektif untuk tujuan jangka pendek, namun belum efektif sepenuhnya dalam tujuan jangka panjang. Untuk mencapai efektivitas lebih tinggi, PKH perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, dan perubahan mindset masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dalam PKH di Kabupaten Garut dapat dikategorikan pada beberapa level. Pada level jangka pendek, bantuan PKH dapat dikatakan meringankan beban keluarga miskin, terutama dalam memenuhi biaya pendidikan dan layanan kesehatan. Pada level jangka menengah, terdapat keluarga yang mulai mengalami perbaikan kualitas hidup, sehingga bisa menyisihkan sebagian dana untuk kebutuhan tambahan. Pada level jangka panjang, terutama pada kemandirian ekonomi dan status kemiskinan, hasilnya masih terbatas. Oleh karena itu, PKH harus dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta penguatan mindset, agar keluarga penerima tidak

hanya menjadi penerima bantuan pasif, melainkan mampu mandiri dalam jangka panjang.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH di Kabupaten Garut

Efektivitas PKH dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, koordinasi Dinas Sosial, kompetensi pendamping, dan validitas data menjadi faktor penting. Secara eksternal, dukungan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kebijakan pusat–daerah turut menentukan keberhasilan. PKH cukup berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, tetapi masih belum mampu mendorong kemandirian ekonomi KPM secara luas. Perubahan nyata lebih dominan terlihat pada bidang pendidikan dan kesehatan, sementara aspek pemberdayaan ekonomi masih lemah akibat adanya mentalitas ketergantungan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara umum berjalan dengan baik. Dari tiga indikator pertama Sutrisno; pemahaman program, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu, PKH di Kabupaten Garut dinilai cukup efektif. Pemahaman para pelaksana dan penerima manfaat sudah relatif baik, meskipun sebagian masyarakat masih keliru menafsirkan PKH sebagai bantuan permanen. Program juga relatif tepat sasaran dengan menyasar keluarga miskin sesuai kriteria, walau masih terdapat masalah akurasi data dalam DTKS. Dari aspek ketepatan waktu, penyaluran bantuan umumnya sesuai jadwal triwulan, meskipun kadang terkendala teknis. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan PKH pada aspek pemberdayaan sosial sudah efektif, tetapi masih memerlukan perbaikan pada aspek edukasi masyarakat dan sistem pendataan.

Secara umum, efektivitas PKH di Kabupaten Garut dapat dikategorikan cukup efektif. Program ini berhasil mencapai tujuan jangka

pendek–menengah berupa peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, untuk tujuan jangka panjang yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan struktural, efektivitas program masih terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pendampingan, perbaikan data, serta penguatan aspek pemberdayaan agar PKH tidak hanya menolong dalam hal konsumsi dasar, tetapi juga mampu mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat.

Daftar Pustaka

- Astari, D. (2018). Teori efektivitas dalam organisasi. Andi Offset.
- Fitriani, R., & Hidayat, T. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 55–70.
- Hidayati, N., & Saputra, M. (2023). Strategi pendamping dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 75–89.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Program Keluarga Harapan (PKH). <https://kemensos.go.id/pencarian/Program-Keluarga-Harapan-2>
- Nurhayati, L. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan dan kesehatan anak di keluarga miskin. *Jurnal Penelitian Sosial*, 10(3), 201–215.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah.
- Pratama, A., & Santoso, B. (2022). Analisis ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 7(1), 34–49.
- Rahmawati, I., & Yuliana, D. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(2), 112–125.
- Stibi, I. (2017). Metode penelitian administrasi publik. CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan

fakir miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Widodo, J. (2020). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi dalam proses kebijakan publik. Media Nusa Creative.